

# Pilkadadasu Yang Berkualitas

Oleh Dr Nispul Khoiri, M. Ag

**Pilkada menjadi momentum membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di Sumut. Perubahan akan terwujud, jika Pilkadadasu ke depan benar-benar menjadi Pilkada berkualitas**

**K**einnginan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara (Pilkadasu) yang berkualitas (Juni 2018), tidak hanya sekedar tuntutan semua pihak, tetapi harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan penting daerah ini. Kualitas dimaksudkan, terselenggaranya Pilkada sukses yang efektif, efisien dan tanpa konflik/pertikaian. Keinginan tidak hanya gagasan semata, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama (KPUD-Bawaslu), dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan Papol.

Kebutuhan Pilkada berkualitas menjadi urgen, dikarenakan: (1) Sumut merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk yang besar akan mengantungkan harapan besar kepada Pilkada berkualitas, guna membawa perubahan kemajuan daerah lebih baik lagi ke depan. (2) Pilkada berkualitas, merupakan momentum suksesnya pembelajaran dan pendewasaan politik bagi daerah ini. Hal ini menjadi keniscayaan, mengukir maju-mundurnya perkembangan kualitas perpolitikan Sumut. (3) Sumut merupakan provinsi dimana tingkat heterogenitasnya cukup tinggi dengan latar belakang basis dan komunitas berbeda. Bagaimana pun sentuhan terhadap rentannya konflik cukup terbuka, terlebih lagi pada ajang Pilkada yang selalu menjadi salah satu motif konflik daerah, kemudian melebar menjadi konflik suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

Sumut selaku daerah yang semakin matang dalam berpolitik, sudah pasti tidak menginginkan Pilkada serentak ke depan, mundur kembali ke belakang. Tetapi harus lebih baik lagi dari Pilkada sebelumnya, mulai proses hingga pada ouputnya. Karena itu beragam persoalan Pilkada, seharusnya sudah dapat diantisipasi sedini mungkin. Proses antisipasi dini tidak sulit dilakukan, selama adanya komitmen bersama melakukan antisipasi itu. Jika tidak justru membukakan ruang terbitnya konflik berbasis Pilkada ke depan.

membawa kerugian besar kepada masyarakat dan daerah Sumut khususnya. Dimana tuntutan pengantungan stabilitas politik Sumut yang tidak terkendali dan stabilitas ekonomi yang juga dapat melemah. Artinya kita lah mengingkari hal tersebut terjadi dan kita juga secara bersama merasakan efek ditimbulkannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas Pilkada di daerah ini, menjadi pilar sentral mengantarkan Pilkada berkualitas. Profesionalitas dan integritas KPU dan Bawaslu semakin dituntut menjaga Pilkada berjalan langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Proses Pilkada sebelumnya, harus menjadi tolak ukur mengantarkan Pilkada ke depan lebih baik lagi. Segala persoalan Pilkada menjadi evaluasi penting bagi KPU dan Bawaslu dalam proses penyempurnaan Pilkada.

Kita tidak menginginkan muncul lagi persoalan klasik, seperti masih ditemukannya daftar pemilih ganda atau pemilih tidak terdaftar sama sekali. Kejelasan jelas dan transparansi proses input daftar pemilih menjadi langkah konkret untuk melakukan pendataan pemilih berdasarkan data otentik, sehingga tidak menghilangkan hak pilih masyarakat. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai sama, yakni satu suara (*one person, one vote, one value*). Begitu pula persoalan teknis lainnya yang dapat mengganggu Pilkada efektif dan efisien, menjadi bagian dari proses tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Sehingga KPU dan Bawaslu, sebagai organisasi sekaligus pengawas Pilkada dapat benar-benar bersinergi mengawal Pilkada berkualitas. Selanjutnya partisipasi masyarakat juga menjadi pilar penting terselenggaranya Pilkada berkualitas. Posisi masyarakat merupakan subjek dan objeknya Pilkada. Masyarakat menjadi pemilih dan memilih menggunakan hak pilihnya secara benar. Berdasarkan tren partisipasi masyarakat pada Pilkada sebelumnya, jelas mengalami penurunan

partisipasi pemilih. Hal ini disebabkan banyak faktor yang menghambat pada Pilkada ke depan tidak terulang kembali.

Penyelenggara Pemilu, partai dan pemilih harus dapat mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Dimana masyarakat harus menyadari, merasa menjadi bagian penting Pilkada. Kecerdasan politik masyarakat untuk memberikan suaranya menjadi poin strategis terselenggaranya Pilkada berkualitas, di samping masyarakat juga dituntut turut mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada. Karena Pilkada berkualitas akan melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas, kemudian berimplikasi kepada kemajuan Sumut menjadi lebih baik lagi ke depan.

Peranan pemerintah juga tidak kalah penting memberikan penguatan Pilkada berkualitas. Bahkan pemerintahlah yang sebenarnya aktor penting mengantarkan Pilkada berkualitas. Peran pemerintah tidak saja memfasilitasi dan pengawasan Pilkada, namun juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sebagai wujud peran pemerintah sebagai bagian dari penyelenggara Pilkada (UU No 32/2004). Salah satu peran pemerintah adalah fasilitator Pilkada, mulai dari melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan advokasi. Peran ini tidak sekedar hanya dibayangkan dan harus dipecahkan dengan mekanisme serata organisasi kepada masyarakat. Begitu pula dalam konteks memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, juga belum terlihat secara maksimal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana mestinya.

Memang Pilkada berkualitas juga harus diperhatikan oleh keterlibatan Papol dan calon Kepala Daerah yang diusung Papol bersangkutan. Papol tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekruitmen politik dan sarana pengatur politik. Tetapi Papol harus pula mampu memberikan pendidikan politik dan pendewasaan politik kepada masyarakat yang dimulai dari tubuh Papol itu sendiri. Sehingga Papol benar-benar menanamkan dirinya sebagai *representation of idea* bertindak untuk mewakili kepentingan masyarakat. Maka setiap kemenangan Kepala Daerah terbangun paradigma positif bahwa bukanlah kemenangan Papol pengusung dan pengikutnya, namun kemenangan tersebut adalah kemenangan masyarakat. Fungsi Papol tidak lebih bagian dari sarana politik, guna menciptakan sebuah demokrasi yang

demokratis dalam bentuk Pilkada berkualitas. Atas dasar pikiran di atas, Pilkada merupakan wujud transformasi kekuasaan untuk melibetkan pemimpin daerah. Pilkada menjadi momentum diharapkan oleh kita semua dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di Sumut. Perubahan akan terwujud, jika Pilkada ke depan benar-benar menjadi Pilkada berkualitas. Dengan indikator terlaksananya dan terukurnya sinergitas kerjasama secara bersama, antara penyelenggara Pilkada (KPU-Bawaslu), pemerintah, Papol dan masyarakat itu sendiri dengan peranannya masing-masing. Semoga.

Penulis adalah Ketua Majelis Pembina Cabang  
Pergerakan Mahasiswa Indonesia Medan Dan  
Dosen Pascasarjana UIN-SU.

## Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/ opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan Redaktur Opini Waspada dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP), penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinal, belum/ tidak diterbitkan di media manapun. Istilah menjadi tanggung jawab penulis.

## SUDUT BATUAH

- \* Jaksa Agung: Korupsi BKKBN bikin gagal program KB
- Pantasan dua anak tidak cukup
- \* Landen Marbun terenyuh dengan keluhan warga Sicanang
- Bisa juga terenyuh?

\* Warga DS ingin Ashari Tambunan lanjutkan pembangunan

- Pucuk dicinta ulam tiba, he...he...he

Okat Soal